

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perparkiran menjadi fenomenayang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Adisasmita dan Adisasmita (2011:70-71) dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*). (Pri Guna Nugraha, dalam jurnal *Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*, 2013)

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Metro pada tahun 2012, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata di Kota Metro mencapai sekitar 19% setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Agusniar Rizka Luthfia membahas tentang *Kuasa Aktor dalam "Dunia" Parkir Liar (Studi Kasus Kuasa Aktor dalam 'Dunia' Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito dengan menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian)*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis menggunakan perspektif Foucault, aktor dalam dunia parkir liar telah memainkan kuasa yang dimiliki untuk membentuk masyarakat parkir liar dengan segenap aturan yang sedemikian rupa. Dalam perspektif Gramsci, adanya kekuatan sistematis yang dikembangkan sehingga menjadikan masyarakat parkir liar lebih homogen, kompak dan senantiasa waspada. Dibuktikan dengan penentuan tarif parkir, identitas dan atribut yang sama dari kelompok parkir liar tersebut.

Jurnal penelitian yang berkaitan dengan minimnya lahan parkir telah dilakukan oleh Pri Guna Nugraha yang berjudul Studi tentang *Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda* dijelaskan bahwa kenyamanan dalam pelaksanaan parkir belum maksimal lantaran terbatasnya lahan parkir yang disediakan pemerintah yang memiliki kapasitas tinggi karena merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Kota Samarinda belum memberikan sarana dan parasarana yang nyaman terhadap pengguna parkir karena lahan parkir yang tidak memadai dan belum terealisasi. Hal tersebut juga dialami oleh Pemerintah Kota Metro. Akibat dari pembangunan Metro Mega Mall, beberapa lahan parkir yang ada di Pasar Cendrawasih berpindah menggunakan bahu jalan. Selain itu, *icon* Kota Metro yaitu Taman Merdeka dan Masjid Taqwa juga memiliki lahan parkir yang terbatas sehingga banyak bermunculan parkir liar di pinggir jalan.

Pembangunan Metro Mega Mall merupakan *urban renewal* dari perubahan Pasar Shopping menjadi kawasan perbelanjaan terpadu. Pembangunan ini membutuhkan lahan yang cukup luas. Pemerintah memutuskan untuk menggunakan lahan parkir Pasar Cendrawasih oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berasal dari Jalan KH. Arsyad dan Jalan Baru Kota Metro. Mukhtar Amir selaku UPT Parkir Kota Metro yang menyebutkan tentang penggunaan lahan parkir Pasar Cendrawasih sebagai tempat penampungan sementara Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan surat edaran Walikota Metro tahun 2012. (<http://www.jejamo.com/parkir-liar-di-kota-metro->

dishubkominformo-tak berdaya.html di akses pada 2 Oktober 2016). Akibat dari penggunaan lahan parkir yang digunakan sebagai lokasi PKL menyebabkan lokasi parkir berpindah menuju bahu Jalan Imam Bonjol.

Mukhtar Amir mengatakan, “dan sebagian ruas Jalan Imam untuk digunakan sebagai tempat parkir sementara, serta penggunaan terminal Kota Metro sebagai tempat parkir.”  
(<http://www.jejamo.com/parkir-liar-di-kota-metro-dishubkominformo-tak-berdaya.html> di akses pada 2 Oktober 2016)

Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul sebagai akibat adanya ketidaklancaran lalu lintas. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Kepolisian Kota Metro dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemudian menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas tersebut dengan menertibkan para petugas parkir yang berada di jalan Imam Bonjol. Penertiban yang dilakukan tidak membuat jera para petugas parkir karena lokasi parkir yang terbatas. Mereka kembali menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir dan tidak lagi menyetorkan pendapatan parkir kepada pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Metro. Dalam wawancara kepada tim Jejamo.com Mukhtar Amir mengatakan,

“awalnya mereka tidak liar dan menyetor parkir ke Kami. Tapi, karena adanya penertiban pedagang kaki lima oleh dinas pasar. Para tukang parkir itu terkena imbasnya. Diusir oleh Kepolisian dan Satpol PP.”  
(<http://www.jejamo.com/parkir-liar-di-kota-metro-dishubkominformo-tak-berdaya.html> di akses pada 2 Oktober 2016)

Dalam jurnal penelitian Aditya Wisnu Priambodo tentang *Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang tahun 2012-2013*, masalah parkir liar telah menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah, juru parkir liar

menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan, menyebabkan kemacetan, adanya campur tangan dari pihak ketiga pada wilayah parkir tertentu dan berganti-gantinya sistem pengelolaan yang diterapkan. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki perparkiran Kota Semarang namun bukan murni untuk memperbaiki visi dan misi melainkan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pejabatnya.

Tarif parkir yang ditetapkan suatu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda-beda. Dilihat dari kemampuan dan kebutuhan masing-masing dari suatu daerah. Penyelewengan tarif parkir yang terjadi di suatu daerah, baik yang dilakukan oleh juru parkir liar maupun juru parkir resmi tetap merugikan pemerintah daerah. Anggota Komisi III DPRD Kota Metro, Hendri Susanto mempertanyakan tarif parkir Kota Metro setelah Ia menggunakan jasa parkir umum.

”Jika kita membayar dengan uang Rp.5.000, akan dikembalikan Rp.3.000. Apabila kita memberikan Rp.2.000 tidak dikembalikan. Artinya Rp.2000 adalah tarif parkirnya. Kita bukan bicara soal nominalnya, tetapi aturan.“

(<http://translampung.com/dewan-pertanyakan-tarif-parkir-di-metro/>  
di unduh tanggal 22 Januari 2017 pukul 17.54 WIB)

Tarif parkir diatur menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dikuatkan dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) dengan hierarki tertinggi yaitu adalah Perda. Tarif parkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda atau Perwali sangat merugikan kas daerah. Biasanya tarif parkir mengalami

perubahan tidak resmi oleh pihak tertentu ketika diadakannya sebuah konser musik atau hiburan yang digelar di Kota Metro.

”Saat akan melakukan parkir, juru parkir tidak ada. Tetapi, saat akan pergi meninggalkan lokasi parkir, petugas parkir akan muncul untuk meminta uang parkir. Terutama jika di Lapangan Sember atau Taman Kota ada acara, tarif parkir itu bisa mencapai Rp.5.000. Alasannya karena ramai, sulit mencari tempat parkir,”

(<http://translampung.com/dewan-pertanyakan-tarif-parkir-di-metro/> di unduh pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.54 WIB)

Berdasarkan hasil Pra-riset pada tanggal 1 November 2016, Mukhtar Amir menyatakan bahwa kebocoran terhadap retribusi parkir memang terjadi. Parkir liar muncul akibat adanya *event* besar yang sering diadakan di Kota Metro,

“saat ada acara besar seperti konser dan pameran, akan muncul tukang parkir dadakan yang membuka lahan parkir di pinggir jalan.”  
(Pra-riset pada tanggal 1 November 2016)

Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang baik dalam menanggulangi parkir liar di Kota Metro.

Berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan munculnya parkir liar di Kota Metro yaitu:

- a. Lahan parkir yang terbatas
- b. Petugas parkir memanfaatkan lokasi parkir ilegal
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
- d. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya dalam menanggulangi parkir liar yang cukup mengganggu keindahan kota. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Metro).”

Berdasarkan jurnal penelitian sebelumnya seperti yang dijelaskan di atas menjadi pendukung penulis untuk melakukan penelitian lanjutan terkait strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perbedaan sudut pandang yang digunakan yaitu mengenai strategi dalam menanggulangi parkir liar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Kota Metro.

#### 2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi Pemerintah Kota Metro khususnya Dinas Perhubungan Kota Metro mengenai pembuatan strategi menanggulangi parkir liar yang berada di tepi jalan umum Kota Metro.